



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Ambon Ekspres

Ambon Ekspres, 20 Maret 2018

Audit Dana Media di Pemprov

AMEKS ONLINE, AMBON.— **Badan** Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Maluku diminta untuk segera melakukan audit investigasi atas dana miliaran rupiah yang diperuntukkan bagi media di Maluku.

BPK sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Olehnya itu alokasi dana media tahun 2017 di Biro Humas Pemprov yang jumlahnya miliaran rupiah perlu diaudit. “Kalau memang benar ada indikasi penggunaan anggaran yang bukan pada porsinya harus ditindaklanjuti BPK sesuai tupoksi mereka,” kata praktisi Hukum, Hendrik Lusikooy kepada koran ini, kemarin.

Menurut Hendrik, media merupakan suatu lembaga sosial yang merupakan alternatif dari pemerintah dalam mensosialisasikan setiap program kerja, dan itu sudah diatur dalam APBD Pemprov Maluku. Kalaupun sudah dianggarkan, dan bila benar tidak disalurkan sesuai sasaran harus dipertanggungjawabkan. Sebab itu uang negara,” tandas Hendrik.

Terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD Maluku Temmy Oersipuny mengatakan, media merupakan salah satu alternatif bagi pemerintah daerah dalam mempublikasikan pemberitaan ke masyarakat terkait program yang dilakukan. Selain itu, pemerintah juga harus mendukung perkembangan media. Salah satunya melalui kerjasama. “Media harus dilibatkan, dengan memperhatikan seluruh hak-haknya. Jika tidak, ini masalah,” kata Oersipuny.

Pemda harus bertanggungjawab penuh atas persoalan media yang hak haknya masi diabaikan. Harus dipertanyakan. “Pemerintah tidak bisa terlepas dari media sebagai sarana publikasi. Baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif sangat membutukannya,” ujar Oersipuny.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Ambon Ekspres

Kalau memang ada indikasi penyalagunaan, kata dia, kejaksaan harus didorong untuk melakukan pemeriksaan, termasuk bendahara. “Ini penting, agar kedepan tidak terjadi hal yang sama lagi,” tegasnya.

Sementara Bendahara Biro Humas Setda Maluku, Salimin Buton pernah mengakui kalau dana media tersebut digunakan untuk kebutuhan lain. Namun demikian persoalan yang dihadapi pihaknya selama ini tetap diselesaikan sengan baik. (NEL)